



Menjemput

Musim Semi

TRANSFORMASI DAN
REFORMASI EKONOMI
2019-2024



Ahmad Erani Yustika
Unggul Heriqbaldi
Fajar B. Hirawan

CATATAN TENAGA KERJA PERDESAAN

Oleh:

Unggul Heriqbaldi

Pendahuluan

Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi kesejahteraan individu maupun masyarakat. Bahkan ketimpangan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat hanya dapat diselesaikan dengan meningkatkan akses setiap individu pada pekerjaan yang layak. Akses pekerjaan juga merupakan kunci bagi pengurangan kemiskinan yang terus menjadi fokus banyak pemerintahan di berbagai negara (lihat misalnya: Albrecht, Navarro, dan Vroman, 2009; Basu, Chau, Fields, dan Kanbur, 2019; Christiaensen, Demery, dan Kuhl, 2011; Kanbur, Christiaensen, dan De Weerd, 2019). Oleh karena itu, memperoleh pekerjaan merupakan salah satu hak mendasar bagi setiap warga negara untuk mencapai kesejahteraan.

Namun, kemampuan suatu perekonomian dalam membuka lapangan kerja tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi, di samping kemampuan sektor ketenagakerjaan untuk menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pertumbuhan ekonomi bermakna meningkatnya jumlah barang dan jasa di suatu negara dan karenanya diperlukan tambahan tenaga kerja untuk memproduksinya. Di sisi lain, semakin tingginya produktivitas tenaga kerja yang mampu dihasilkan oleh sektor ketenagakerjaan

akan berdampak pada peningkatan investasi, sehingga kesempatan dan lapangan kerja pada gilirannya akan semakin luas (lihat misalnya: Bailey, Driffield, dan Kispeter, 2019; Cuadros, Martín-Montaner, dan Paniagua, 2019; Jia, Han, Peng, dan Lei, 2019; Ngo, 2019).

Pada 2019 (Februari) angkatan kerja di Indonesia sebanyak 136,2 juta orang atau mengalami peningkatan 20% selama 10 tahun terakhir. Dari total angkatan kerja tersebut 45% (61,7 juta) angkatan kerja berada di wilayah perdesaan, sedangkan pada 2009 pangsa angkatan kerja perdesaan masih berada di level 58%. Ini artinya, selama 10 tahun terakhir telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam sektor pekerjaan perdesaan.

Penurunan pangsa angkatan kerja di perdesaan selama sepuluh tahun terakhir tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekonomi secara struktural dan faktor demografis. Pada aspek demografis, jumlah angkatan kerja perdesaan yang turun 6,5% dari 66,1 juta menjadi 61,8 juta disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk yang berumur di atas 15 tahun. Selama 10 tahun terakhir jumlah penduduk dengan usia di atas 15 tahun turun 9%. Di samping itu, jumlah partisipasi sekolah untuk tingkat menengah atas mengalami peningkatan sehingga kedua faktor tersebut menyebabkan jumlah angkatan kerja mengalami penurunan. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah urbanisasi. Faktor perbedaan upah antara desa dan kota serta tingginya pertumbuhan ekonomi perkotaan telah mendorong sebagian masyarakat desa melakukan urbanisasi.

Kontributor lain dalam perubahan angkatan kerja perdesaan adalah perubahan struktur ekonomi. Jika membandingkan komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2008 dan 2018, maka akan terlihat bagaimana sektor pertanian mulai berkurang pangsanya (dari 14% menjadi 13%) dalam pembentukan PDB. Penurunan pangsa juga dialami oleh industri manufaktur (dari 27% menjadi 22%) oleh karenanya periode ini dapat dinyatakan sebagai periode deindustrialisasi di Indonesia. Penurunan pangsa kedua sektor ini dikompensasi oleh meningkatnya pangsa sektor jasa dari 51% menjadi 57%.

Sebagai sebuah catatan, perubahan struktural juga terjadi dalam sektor pertanian yang notabene merupakan sektor penyangga utama di perdesaan. Selama periode yang sama, pangsa nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor pangan terhadap total nilai tambah sektor pertanian mengalami penurunan

sangat besar dari 50% menjadi 23%. Pada saat yang sama, subsektor perkebunan mengalami pertumbuhan nilai tambah yang sangat tinggi, sehingga pada 2018 pangsa nilai tambahnya mencapai 30% meningkat 14% dari level di 2008. Subsektor lain yang berkembang adalah hortikultura; pangsa nilai tambahnya melonjak menjadi 11 %pada 2018.

Profil Umum Angkatan Kerja Perdesaan

Jika menggunakan rentang waktu 2009-2019, kondisi pekerjaan perdesaan memperlihatkan perkembangan positif. Penduduk yang menganggur dari sisi jumlah telah mengalami penurunan dari 4,2 juta orang menjadi 2,1 juta orang, meskipun pada aspek tingkat partisipasi angkatan kerja tidak terjadi perubahan yang berarti. Kinerja pekerjaan yang relatif baik juga dapat dilihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka pada 2019.

Tabel 1. Profil Umum Angkatan Kerja Perdesaan

Profil	2009	2019	Perubahan (%)
Angkatan Kerja	5.089.517	61.746.593	-6.57
Bekerja	1.886.839	59.618.371	-3.67
Pengangguran Terbuka	1.202.678	2.128.222	-49.36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,26	71,97	1.71
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.36	3,49	-2.87

Sumber: BPS, 2019

Sebagai konsekuensi dari perubahan struktural dalam ekonomi perdesaan, selama 10 tahun terakhir telah terjadi pergeseran dalam pekerjaan jika ditinjau dari sisi sektoral. Pada 2019, sebagian besar penduduk (52%) bekerja di sektor pertanian. Sedangkan sisanya bekerja di industri pengolahan (10,50%), perdagangan (13,40%) dan sektor lainnya. Sedangkan pada 2009, pekerja di sektor pertanian masih berada di kisaran 62% dan pangsa pekerja di industri pengolahan dan konstruksi masing-masing 8,31% dan 3,61%.

Tabel 2. Jumlah Pekerja Berdasarkan Sektor di Perdesaan

Sektor	2009		2019	
	Total	Pangsa	Total	Pangsa
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	38.433.871	62,10	31.120.596	52,20
Industri Pengolahan	5.140.074	8,31	6.257.143	10,50
Perdagangan, rumah makan dan hotel	8.076.822	13,05	7.987.276	13,40
Bangunan	2.232.183	3,61	3.137.018	5,26
Pendidikan	-	-	2.470.769	4,14
Akomodasi dan Makanan dan Minuman	-	-	2.136.416	3,58
Transportasi dan Pergudangan	2.462.103	3,98	1.344.628	2,26
TOTAL	61.886.839		59.618.371	

Sumber: BPS

Penurunan pangsa pekerja di sektor pertanian (10%) selama periode sepuluh tahun terakhir tersebut lebih tinggi dari penurunan pangsa *output* sektor pertanian dalam PDB. Hal ini mengonfirmasi hipotesis *abundant labor supply* di perdesaan (Lewis, 1954). Sektor modern yang ditunjukkan oleh industri manufaktur dan jasa telah mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan sektor perdesaan, yang diwakili oleh pertanian. Pertumbuhan yang tinggi di sektor modern ini juga disertai dengan level upah yang lebih tinggi dibandingkan upah di perdesaan. Hal ini mendorong terjadinya perpindahan tenaga kerja dari *low-skilled abundant sector* di perdesaan ke sektor yang lebih produktif di perkotaan.

Pergeseran tenaga kerja lintas sektor di perdesaan pada dasarnya adalah hal yang positif. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan penurunan pangsa tenaga kerja sektor pertanian tidak tercermin dari menurunnya rasio nilai tambah pertanian terhadap jumlah pekerja di sektor pertanian. Bahkan sejak 2010, rasio ini cenderung terus meningkat secara tajam.

Namun, perkembangan positif dalam pekerjaan di perdesaan ini masih meninggalkan beberapa tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan pemerintah yang efektif. Bagian selanjutnya akan membahas tantangan tenaga kerja maupun kondisi pekerjaan di perdesaan. Pada bagian akhir akan disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja dan pekerjaan di perdesaan.

Tantangan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Perdesaan

Salah satu tantangan utama tenaga kerja di perdesaan adalah pengangguran usia muda. Pada 2019, dari total jumlah penganggur 2,1 juta orang, sebanyak 20% adalah mereka dalam kelompok usia 15-19 tahun. Jika ditambahkan satu kelompok usia lainnya, yaitu 20-24 maka akan diperoleh proporsi yang sangat besar yaitu 58 persen. Ini artinya satu dari dua penganggur adalah mereka yang usianya di bawah 24 tahun. Kondisinya sangat *alarming* bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi baik di tingkat SMK maupun diploma dan politeknik, karena pada 2018 sudah lebih dari 10 ribu desa dengan keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang artinya ada satu SMK di setiap tujuh desa.

Masalah *youth unemployment* ini juga tercermin dari angka setengah penganggur yang tinggi pada kelompok usia muda.¹ Proporsi setengah penganggur pada kelompok umur 15-24 tahun mencapai 25%. Sedangkan jika penganggur terbuka dan setengah penganggur ditambahkan pada kelompok umur tersebut akan diperoleh angka 2,8 juta orang atau sama dengan 34% dari total penganggur dan setengah penganggur.

Tabel 3. Pengangguran Terbuka dan Setengah Penganggur Perdesaan (2019)

Kelompok Umur	Pengangguran Terbuka	%	Setengah Penganggur	%	Pengangguran dan Setengah Menganggur
15-19	432.339	20,31	490.544	8,05	922.883
20-24	807.761	37,95	1.057.781	17,36	1.865.542
25-29	400.213	18,81	905.499	14,86	1.305.712
30-34	158.337	7,44	727.226	11,93	885.563
35-39	99.176	4,66	714.649	11,73	813.825
40-44	75.367	3,54	677.236	11,11	752.603
45-49	71.423	3,36	536.846	8,81	608.269
50-54	46.534	2,19	391.978	6,43	438.512
55-59	21.966	1,03	324.558	5,33	346.524
60+	15.106	0,71	268.116	4,40	283.222
Total	2.128.222	100	6.094.433	100	8.222.655

Sumber: BPS

¹ Setengah penganggur merujuk pada mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu kurang dari 35 jam per minggu, dan masih dalam proses mencari pekerjaan dan mempertimbangkan untuk menerima pekerjaan

Dari perspektif struktur usia, struktur pekerja di Indonesia semakin menua. Selama sepuluh tahun terakhir jumlah pekerja di perdesaan mengalami penurunan hampir 4%. Namun, jika dilihat lebih jauh, penurunan jumlah pekerja muda jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Sebagai contoh, jumlah pekerja pada kelompok umur 15-19 tahun menurun hampir 30%. Lebih jauh pekerja pada kelompok umur 25-29 dan 30-34 menurun masing-masing 13% dan 15%. Bandingkan dengan jumlah pekerja yang berada di kelompok umur 55-59 dan 60+ yang justru mengalami peningkatan masing-masing 21% dan 13%.

Tabel 4. Pekerja Berdasarkan Kelompok Umur di Perdesaan

Kelompok Umur	2009 (%)	2019 (%)	Perubahan (%)
15-19	3.693.591	2.620.609	-29,05
20-24	5.736.111	5.618.732	-2,05
25-29	7.357.434	6.426.477	-12,65
30-34	7.896.300	6.719.753	-14,90
35-39	7.815.561	7.068.770	-9,56
40-44	7.174.751	7.038.475	-1,90
45-49	6.640.851	6.554.596	-1,30
50-54	5.340.350	5.714.558	7,01
55-59	3.813322	4.621.984	21,21
60+	6.418.568	7.234.417	12,71
TOTAL	61.886.839	59.618.371	-3,67

Sumber: BPS

Indonesia juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih relatif rendah pada 2019. Hal ini diperlihatkan dari masih tingginya proporsi angkatan kerja dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga 53%. Ini artinya perlu disusun program keterampilan yang bersifat *targeted*, yaitu bagi angkatan kerja yang pendidikan formalnya masih rendah. Hal ini penting dilakukan terutama

untuk meningkatkan kondisi pekerjaan para pekerja di samping untuk meningkatkan *employability* di sektor formal.

Jika ditinjau dari aspek pendidikan dan pengangguran, tampak bahwa kontributor utama pengangguran adalah lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMK. Pada permasalahan ini, maka kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial dapat berperan besar dalam meningkatkan partisipasi kasar di tingkat SMK sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan dengan menciptakan *linkage* dengan industri yang relevan.

Pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat gencar dalam melakukan perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi. Namun, arah kebijakan dan program yang dijalankan masih belum terintegrasi dengan baik. Bahkan dalam aspek tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, begitu banyak kementerian yang terlibat tanpa kejelasan bagaimana program satu kementerian dengan kementerian lainnya saling terhubung dan saling melengkapi. Bahkan dua kementerian koordinasi di dalam kabinet memiliki rencana dan *roadmap* masing-masing dalam pengembangan pendidikan SMK.

Kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi seolah belum menyentuh bagaimana program revitalisasi SMK terintegrasi dengan jenjang diploma, politeknik, dan program pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK). Hal-hal mendasar seperti bagaimana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terintegrasi dan keberlanjutan dengan jenjang berikutnya baik secara vertikal (di pendidikan tinggi) maupun secara horizontal yaitu dengan program pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh swasta maupun Kementerian Tenaga kerja belum tersusun dengan baik. Aspek lain juga masih menjadi kendala seperti bagaimana pola kerja sama industri dan sekolah didesain, dilaksanakan, dan distandarisasi. Aspek lainnya adalah kendala regulasi yang masih belum selesai dibenahi seperti regulasi tentang PNBP dan peraturan lainnya yang harus disesuaikan untuk memfasilitasi ruang gerak dan pertumbuhan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Perdesaan (2019)

Tingkat Pendidikan	Bekerja		Pengangguran Terbuka	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tanpa Pendidikan	2.915.259	4,89	20.084	0,94
Tidak Tamat SD	10.574.175	17,74	125.299	5,89
Sekolah Dasar	18.716.520	31,39	316.312	14,86
Sekolah Menengah Pertama	10.958.754	18,38	414.206	19,46
Sekolah Menengah Atas (umum)	8.315.219	13,95	578.968	27,20
Sekolah Menengah Atas (kejuruan)	3.979.698	6,68	400.370	18,81
Diploma	878.023	1,47	80.319	3,77
Universitas	3.2980.723	5,50	192.664	9,05
Total	59.618.371	100	2.128.222	100

Sumber: BPS

Masalah pekerjaan yang dihadapi perdesaan di antaranya adalah jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar yang masih relatif tinggi. Profil 2019 memperlihatkan jumlah pekerja keluarga hampir 12 juta orang atau sama dengan 20% dari total orang yang bekerja di perdesaan. Ini artinya 2 di antara 10 orang yang bekerja di perdesaan tidak memperoleh pendapatan. Ini juga berarti kehidupannya tergantung pada pendapatan keluarga atau orang lain.

Dalam aspek gender, pekerja laki-laki di desa dan kota memperoleh rata-rata pendapatan per jam 5% lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterima oleh pekerja perempuan. Namun jika ditelaah secara sektoral, perbedaan upah lebih tinggi dapat ditemukan di industri manufaktur, di mana pekerja laki-laki rata-rata memperoleh pendapatan per jam 30% lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Kesenjangan upah lebih baik terjadi di sektor pertanian, di mana pekerja laki-laki hanya memiliki upah per jam 17,5% lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Lebih jauh lagi, jumlah pekerja perdesaan yang memperoleh pendapatan per bulan kurang dari 2/3 median upah (Rp1.285.920) masih cukup tinggi. Jumlah pekerja perempuan perdesaan yang memperoleh pendapatan per bulan

lebih rendah dari 2/3 median upah sebanyak 49%. Kondisi ini jauh lebih buruk dibandingkan kondisi pekerja laki-laki perdesaan yang jumlahnya sekitar 20% dengan pendapatan di bawah 2/3 median upah.

Dalam aspek kemiskinan, pada Maret 2019, garis kemiskinan di perdesaan sama dengan Rp404.398 pengeluaran per bulan. Jika dilihat dari upah rata-rata yang diterima oleh pekerja perdesaan, maka terdapat 17% pekerja perempuan dan 4% pekerja laki-laki yang upahnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengonfirmasi analisis pada bagian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa kondisi pekerjaan perempuan lebih buruk dibandingkan laki-laki, terutama di perdesaan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perkembangan sepuluh tahun terakhir di perdesaan memperlihatkan beberapa perubahan. Perubahan pertama adalah transformasi struktural memperlihatkan peran sektor pertanian yang semakin berkurang dalam perekonomian. Hal ini berimbas pada pergeseran tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lainnya di perdesaan. Jumlah pekerja di sektor pertanian menyusut sedangkan sektor lain mengalami pertumbuhan. Perubahan demografis pun terjadi dan berkontribusi pada menurunnya jumlah angkatan kerja di perdesaan.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor ketenagakerjaan yang utama di perdesaan adalah *youth unemployment*. Program pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di jenjang sekolah menengah atas, baik umum maupun kejuruan cukup berhasil seperti ditunjukkan oleh meningkatnya proporsi pekerja perdesaan yang berlatar belakang pendidikan SMA dan SMK. Namun pada saat yang sama, angka pengangguran tertinggi juga terjadi pada usia awal pekerja 15-19 tahun.

Tantangan ketenagakerjaan lainnya adalah jumlah pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga masih relatif tinggi, 2 dari 10 pekerja di perdesaan bekerja tanpa menerima upah. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan juga masih terjadi di berbagai sektor. Dari sisi kelayakan, sektor ketenagakerjaan masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki kondisi pekerjaan di perdesaan karena upah rendah masih dialami oleh hampir setengah pekerja dan masih ada yang bekerja dengan upah di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tenaga kerja dan kondisi pekerjaan di perdesaan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan pemerintah.

1. Menyelaraskan berbagai program dan kebijakan lintas kementerian dalam aspek pembangunan ekonomi lokal. Inisiatif yang dapat dilakukan adalah menyusun platform yang kuat untuk kolaborasi di tingkat lokal seperti desa dengan mengintegrasikan program di seluruh kementerian yang relevan. Satu hal yang dapat dilakukan adalah membuat program promosi pekerjaan yang layak di tingkat desa dengan sasaran yang jelas dan terintegrasi dengan program dana desa (Kemendes) dan program revitalisasi vokasi (Kemendikbud dan Kemenaker).
2. Menambah nilai melalui keterampilan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi industri dan layanan pelatihan lokal dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan magang di tingkat kabupaten/kota dengan memanfaatkan hasil analisis pasar tenaga kerja lokal.
3. Kebijakan mendorong pekerjaan yang berkualitas. Cara yang dapat ditempuh diantaranya melalui penciptaan program peningkatan keterampilan nasional untuk kaum muda di sektor-sektor terpilih dan menjanjikan, sehingga kaum muda dapat lebih mudah pindah ke pekerjaan atau posisinya dengan keterampilan yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Albrecht, J., Navarro, L., dan Vroman, S. (2009). The Effects of Labour Market Policies in an Economy with an Informal Sector. *The Economic Journal*, 119(539), 1105-1129. <<https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2009.02268.x>>.
- Bailey, D., Driffield, N., dan Kispeter, E. (2019). Brexit, Foreign Investment and Employment: Some Implications for Industrial Policy? *Contemporary Social Science*, 14(2), 174–188. <<https://doi.org/10.1080/21582041.2019.1566563>>.
- Basu, A. K., Chau, N. H., Fields, G. S., dan Kanbur, R. (2019). Job Creation in A Multi-Sector Labour Market Model For Developing Economies.

- Oxford Economic Papers*, 71(1), 119–144. <<https://doi.org/10.1093/oeq/gpy029>>.
- Christiaensen, L., Demery, L., dan Kuhl, J. (2011). The (Evolving) Role of Agriculture in Poverty Reduction—An Empirical Perspective. *Journal of Development Economics*, 96(2), 239–254. <<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.10.006>>.
- Conley, T., dan Udry, C. (2001). Social Learning through Networks: The Adoption of New Agricultural Technologies in Ghana. *American Journal of Agricultural Economics*, 83(3), 668–673. <<https://doi.org/10.1111/0002-9092.00188>>.
- Cuadros, A., Martín-Montaner, J., dan Paniagua, J. (2019). Migration and FDI: The Role of Job Skills. *International Review of Economics & Finance*, 59, 318–332. <<https://doi.org/10.1016/J.IREF.2018.09.007>>.
- de Hoyos, R. E., dan Medvedev, D. (2011). Poverty Effects of Higher Food Prices: A Global Perspective. *Review of Development Economics*, 15(3), 387–402. <<https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2011.00615.x>>.
- de Pee, S., Brinkman, H.-J., Webb, P., Godfrey, S., Darnton-Hill, I., Alderman, H., Bloem, M. W. (2010). How to Ensure Nutrition Security in the Global Economic Crisis to Protect and Enhance Development of Young Children and Our Common Future. *The Journal of Nutrition*, 140(1), 138S–142S. <<https://doi.org/10.3945/jn.109.112151>>.
- Hamilton-Hart, N. (2019). Indonesia's Quest for Food Self-sufficiency: A New Agricultural Political Economy? *Journal of Contemporary Asia*, 1–25. <<https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1617890>>.
- Hiironen, J., dan Riekkinen, K. (2016). Agricultural impacts and profitability of land consolidations. *Land Use Policy*, 55, 309–317. <<https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2016.04.018>>.
- Hudson, S., dan Ritchie, J. R. B. (n.d.). *Film tourism and destination marketing: The case of Captain Corelli's Mandolin*. <<https://doi.org/10.1177/1356766706064619>>.
- Ivanic, M., dan Martin, W. (2008). Implications of Higher Global Food Prices for Poverty in Low-Income Countries¹. *Agricultural Economics*, 39, 405–416. <<https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2008.00347.x>>.

- Jia, N.-S., Han, Y.-H., Peng, K.-M., dan Lei, H.-Z. (2019). Does Outward Foreign Direct Investment Boost Employment in the Home Country? Evidence from China's Microlevel Data. *Emerging Markets Finance and Trade*, 1–18. <<https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1601550>>.
- Kanbur, R., Christiaensen, L., dan De Weerd, J. (2019). Where to Create Jobs to Reduce Poverty: Cities or Towns? *The Journal of Economic Inequality*, 1–22. <<https://doi.org/10.1007/s10888-019-09419-5>>.
- Levers, C., dan Müller, D. (2019). Mapping Export-Oriented Crop Production. In *Telecoupling* (pp. 89–113). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-11105-2_5>.
- Lunduka, R., Ricker-Gilbert, J., dan Fisher, M. (2013). What are the Farm-Level Impacts of Malawi's Farm Input Subsidy Program? A Critical Review. *Agricultural Economics*, 44(6), 563–579. <<https://doi.org/10.1111/agec.12074>>.
- MacDonald, G. K., Brauman, K. A., Sun, S., Carlson, K. M., Cassidy, E. S., Gerber, J. S., dan West, P. C. (2015). Rethinking Agricultural Trade Relationships in an Era of Globalization. *BioScience*, 65(3), 275–289. <<https://doi.org/10.1093/biosci/biu225>>.
- McCulloch*, N. (2008). Rice Prices and Poverty In Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 45–64. <<https://doi.org/10.1080/00074910802001579>>.
- Ngo, cQ. (2019). Distributional Effects of Foreign Direct Investment on Poverty: The Case of Vietnam. *International Journal of Trade and Global Markets*, 12(1), 43. <<https://doi.org/10.1504/IJTGM.2019.097909>>.
- Panigrahi, R. (2019). Economics of Subsidies in a Welfare State: Dynamics of Populist Policies and Farm Profitability. *Global Business Review*, 097215091881690. <<https://doi.org/10.1177/0972150918816902>>.
- Ramirez, M., Bernal, P., Clarke, I., dan Hernandez, I. (2018). The Role of Social Networks in the Inclusion Of Small-Scale Producers In Agri-Food Developing Clusters. *Food Policy*, 77, 59–70. <<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.04.005>>.
- Reardon, T., Barrett, C. B., Berdegue, J. A., dan Swinnen, J. F. M. (2009). Agrifood Industry Transformation and Small Farmers in Developing

- Countries. *World Development*, 37(11), 1717–1727. <<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.023>>.
- Rudnick, J., Niles, M., Lubell, M., dan Cramer, L. (2019). A Comparative Analysis of Governance and Leadership in Agricultural Development Policy Networks. *World Development*, 117, 112–126. <<https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2018.12.015>>.
- Skoufias, E., Tiwari, S., dan Zaman, H. (2012). Crises, Food Prices, and the Income Elasticity of Micronutrients: Estimates from Indonesia. *The World Bank Economic Review*, 26(3), 415–442. <<https://doi.org/10.1093/wber/lhr054>>.
- Warr, P., dan Yusuf, A. A. (2014). World Food Prices and Poverty In Indonesia. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 58(1), 1–21. <<https://doi.org/10.1111/1467-8489.12015>>.

Tentang Penulis

AHMAD ERANI YUSTIKA



Lahir di Ponorogo (1973). Menyelesaikan gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya, 1996. Setelah lulus aktif mempublikasikan tulisan diberbagai media massa (sekitar 750 artikel telah diterbitkan di koran/majalah nasional) dan jurnal ilmiah. Juga telah membuat sekitar 30 buku. Di samping itu, telah mempresentasikan *paper* dalam forum-forum seminar nasional maupun internasional. Pada 2001 menuntaskan studi *postgraduate* (MSc) dan 2005 menyelesaikan studi doktoral (Ph.D.), semuanya di University of Göttingen (*Georg-August-Universität Göttingen*), Jerman (melalui beasiswa GTZ dan DAAD), dengan spesialisasi Ekonomi Kelembagaan.

Sejak 1997 bekerja sebagai dosen di kampus almamater dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya (2007-2009) dan Pembantu Dekan I (Akademik) pada 2009-2010. Di luar itu, 2008-2015 mengemban amanah sebagai Direktur Eksekutif INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*), Jakarta. Sejak 2010-2017 menjadi Anggota BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia), serta menjadi Ketua *Focus Group* Infrastruktur Pengurus Pusat ISEI (2012-2015) dan Ketua *Focus Group* Ekonomi Kreatif PP ISEI (2016-2019). Pada 2006 dan 2009 terpilih sebagai Dosen Berprestasi I Universitas Brawijaya (dan dosen berprestasi tingkat nasional) dan 2007 terpilih sebagai penulis buku paling produktif di Fakultas Ekonomi-Universitas

Brawijaya. Mulai 1 Juni 2010 diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (pengukuhan dilakukan pada 30 Desember 2010). Periode 2011-2017 menjabat sebagai anggota Dewan Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Pada 2015-2017 menjadi Dirjen PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan 2017-2018 menjadi Dirjen PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Pada 2018-2019 menjadi Staf Khusus Presiden (bidang ekonomi). Saat ini menjabat Ketum Umum IKA UB (Ikatan Alumni Universitas Brawijaya) periode 2019-2023.

UNGGUL HERIQBALDI



Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di FE Universitas Gadjah Mada tahun 1997. Pendidikan S2 dan S3 diselesaikan di Monash University (2002) dan Universitas Brawijaya (2012). Sejak tahun 2000 bergabung sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya dengan spesialisasi bidang ekonomi internasional dan pembangunan. Beberapa pengalaman penelitian dan konsultansi bersama dengan mitra seperti Bank Dunia, *International Labor Organization* (ILO), *International Budget Partnership* (IBP) dan institusi lainnya.

Penerima beasiswa *Australian Development Scholarship* (ADS) (2000-2002) dan pernah menjabat sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu, Universitas Airlangga (2014-2015) dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga (2013-2014). Pengalaman terakhir sebagai *Senior Economic Advisor* pada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (2015-2018).

MOHAMMAD REZA HAFIZ AKBAR



Menyelesaikan studi sarjananya di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya (2009-2013). Pada saat menjadi mahasiswa, Reza aktif di BEM Fakultas Ekonomi dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sejak 2014 hingga sekarang menjadi peneliti di *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF).

MUTIARA ALAM ADDINI



Pekerja profesional di bidang ekonomi pembangunan dengan pengalaman di bidang *advisory*, manajemen proyek dan riset *impact evaluation* di Asia Tenggara. Pengalaman riset mencakup bidang pengembangan UMKM, ekonomi pembangunan, pertanian, dan intervensi sanitasi; serta memiliki pengalaman bekerja tidak hanya di Indonesia, namun juga Amerika Serikat dan Kamboja. Sebelumnya bekerja sebagai *Research Associate* di *Center of Education and the Workforce* di *Georgetown University*, *Graduate Fellow* di *Causal Design Cambodia* serta Staf SMIDeP-JICA Indonesia. Mutiara juga merupakan *Social Innovation Fellow* di *Starting Bloc*, Amerika Serikat. Menempuh pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar *Master of International Development Policy* dari *Georgetown University*, Amerika Serikat.

ABDUL MANAP PULUNGAN



Abdul Manap Pulungan, dilahirkan di Padangsidempuan, 27 Juli 1984. Menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2006 dan Maggister Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) di Universitas Indonesia tahun 2014. Sejak 2008 hingga kini bergabung di *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef). Sejumlah tulisan telah dipublikasi di media cetak seperti *Investor Daily*, *Bisnis Indonesia*, *Koran Kontan*, *the Jakarta Post*, *Media Indonesia*, dan *Republika*.

DITA NURUL AINI



Menyelesaikan studi S1 Ekonomi Pembangunan pada 2011 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Menyelesaikan pendidikan magister Ilmu Ekonomi di universitas yang sama pada tahun 2015. Berpengalaman menjadi asisten dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang sampai 2016. Selain itu juga pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sampai 2018. Saat ini aktif sebagai Tenaga Pengajar Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional Jakarta dan juga peneliti pada lembaga penelitian ECORIST Malang dan INSTEP Jakarta.

DWINDA RAHMAN



Dwindi Rahman. Asal Padang, Sumatera Barat. Menamatkan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Jurusan Akuntansi tahun 2013. Sejak jadi mahasiswa aktif dalam kegiatan intra dan ekstra kampus. Pernah bekerja di KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (Kreston International). Setelah itu, bekerja menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi. Beberapa tulisan telah diterbitkan di media cetak atau *online*.

RIYANDI SARAS ANGGITA



Lahir di Jakarta, 14 Januari 1993. Saat ini aktif menjabat sebagai konsultan di PT. Sarana Multi Infrastruktur Indonesia. Telah menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2015 dan pascasarjana pada bidang *Economics and Econometrics* di *University of Nottingham* tahun 2017 dengan beasiswa *British Chevening Scholarship*.

Sebelumnya bergabung sebagai Tenaga Ahli Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan pembantu asisten Staf Khusus Presiden di bidang ekonomi.

FAJAR B. HIRAWAN



Saat ini aktif berkarya sebagai Peneliti di Departemen Ekonomi, *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Jakarta, Indonesia, sejak November 2006. Selain itu, beliau aktif sebagai Faculty Member di Sekolah Kepemerintahan dan Kebijakan Publik Indonesia (*School of Government and Public Policy* (SGPP)). Fajar memiliki banyak pengalaman penelitian dan pengajaran, khususnya terkait topik yang berhubungan dengan ekonomi makro, ketahanan pangan, ekonomi digital, UMKM, sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan isu pembangunan ekonomi lainnya di Indonesia.

Selama perjalanan karirnya, Fajar juga sangat aktif menjadi konsultan di beberapa lembaga pemerintahan dan swasta. Di masa akhir pemerintahan Jokowi, beliau mendapatkan kesempatan menjadi Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi (Juli 2018-Oktober 2019). Beliau aktif memberikan perspektifnya kepada awak media, baik cetak maupun elektronik, dari dalam maupun luar negeri. Beberapa artikel atau tulisan juga sudah banyak diterbitkan, baik dalam bentuk laporan penelitian, jurnal, dan masih banyak lagi.

Beliau menyelesaikan studi S1 di bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) di tahun 2006 dan studi S2 di bidang Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas di Roma “La Sapienza,” Italia di tahun 2009. Fajar memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi di *School of Economics, University of Sydney, Australia* di tahun 2017.

DHENNY YUARTHA JUNIFTA



Alumnus universitas Brawijaya. Sejak Mahasiswa, Dhenny telah aktif di dunia riset dan organisasi. Mantan Sekretaris Umum Himpunan mahasiswa Islam (HMI) komisi ekonomi dan bisnis, pernah menjadi asisten peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK) FEB-UB di tahun 2014. Memenangkan beberapa penghargaan riset di level nasional. Spesialisasi dan minat dalam ekonomi politik internasional. Menyusun tugas akhir dengan judul “Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Upaya Integrasi Ekonomi Asia Pasifik dan kompetisi Negara Hegemon ekonomi”.

Pada akhir Tahun 2016, bergabung menjadi asisten peneliti di *Institute for Development of economics and Finance* (INDEF), dan peneliti muda hingga kini. Selain aktif di INDEF, tahun 2017-2018 pernah bertugas di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT). Sejak 2018 hingga sekarang aktif sebagai Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden. Aktif menulis artikel di media masa regional maupun nasional.

MUHAMMAD MAULANA



Meraih gelar *Master of Public Policy* dari *Flinders University-Australia* pada 2016 dengan thesis berjudul ‘Politik Penganggaran Kesehatan di Indonesia’. Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Cabang Australia Selatan periode 2015-2016. Peneliti kebijakan dan tata kelola anggaran publik sejak 2007 hingga 2014 di Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi

Anggaran). Pada 2018, bersama sejumlah pegiat aktivis anggaran mendirikan Perkumpulan *Policy Reform Initiatives and Democracy* (PRIDe).

HANS ARYAGUNA ABADI



American Student Union (AASU) dan Persatuan Mahasiswa Indonesia Seluruh Amerika Serikat (PERMIAS).

Hans Aryaguna Abadi, lahir di Bandung, Indonesia. Menyelesaikan studi SMA di *United World College Changhsu*, China dan saat ini aktif sebagai mahasiswa S1 di bidang Keuangan dan Ekonomi di *University of Florida*, Amerika Serikat. Penerima beasiswa Davis World Scholar. Mempunyai pengalaman magang di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (2019). Saat ini aktif sebagai anggota organisasi kemahasiswaan

HARIANI DWI ANDARI



Oktober 2019 bergabung di Kementerian Sekretariat Negara sebagai Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden.

Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Ilmu Komunikasi di Fakultas Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tahun 2015. Tahun 2016-2018 bergabung sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kemudian tahun 2018-